

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, *MONITORING*
DAN EVALUASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
DENGAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**

Cahya Budi Hermanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of budget planning, budget execution, monitoring and evaluation, and budget accountability on performance accountability. This type of research is quantitative with survey research methods. Survey method is a research method that takes a sample from a population and uses a questionnaire as a data collection tool. The result of the model feasibility test (Anova) obtained a calculated F value of 71.481, with a F table value of 2.43, then the calculated F value > F table (71.481 > 2.43) with a p-value (sig) of 0.000 less than α of 0.05, so that the regression meets the model's eligibility criteria for predicting performance accountability variables. T test results obtained tcount value of the budget planning variable at 2.862, the budget execution variable at 2.779, the monitoring and evaluation variable at 4.555, and the budget accountability variable at 3.706 greater than the ttable value at 1.654. Based on these results it can be concluded that budget planning, budget execution, monitoring and evaluation, and budget accountability have a significant effect on performance accountability in the Ministry of Women's and Children's Empowerment.

Keywords: budget planning, budget execution, monitoring and evaluation, budget accountability, performance accountability.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian survey. Metode survey adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Hasil uji kelayakan model (Anova) diperoleh nilai F hitung sebesar 71,481, dengan nilai F tabel sebesar 2,43, maka nilai F hitung > F tabel (71,481 > 2,43) dengan p-value (sig) 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, sehingga regresi memenuhi kriteria kelayakan model untuk memprediksi variabel akuntabilitas kinerja. Hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel perencanaan anggaran sebesar 2,862, variabel pelaksanaan anggaran sebesar 2,779, variabel monitoring dan evaluasi sebesar 4,555, dan variabel pertanggungjawaban anggaran sebesar 3,706 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,654. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan

evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban anggaran, akuntabilitas kinerja.

I. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari suatu proses organisasi, yakni perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban publik. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa media pertanggungjawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang digunakan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2012 dan 2013, secara umum ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab masih rendahnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya karena sistem pengelolaan anggaran yang masih lemah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan dan pengawasan keuangan. Selain itu, LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga

yang mendapatkan nilai B atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada tahun 2013 dengan skor 66,70 dengan beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menelaah kembali indikator tujuan dan sasaran Kementerian PPPA agar dilengkapi dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*)
2. Menindaklanjuti penetapan kinerja dengan rencana aksi yang dapat membantu manajemen untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala
3. Pencapaian target-target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja hendaknya dievaluasi secara optimal dan dimanfaatkan untuk pengendalian serta pemantauan kinerja.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tidak maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari lemahnya sistem perencanaan anggaran yang dilakukan sehingga pencapaian realisasi anggarannya tidak maksimal, proses pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur perencanaan anggaran sehingga terjadi penumpukan realisasi anggaran pada akhir periode, proses pertanggung-

jawaban anggaran yang masih lemah dan kurang akuntabel sehingga banyak temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi sehingga masih ada temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK yang berulang pada masing-masing periode, masih terjadi penyimpangan jenis belanja, dan ketidaktepatan penggunaan akun belanja serta tidak tercapainya output yang ditentukan.

II. KAJIAN TEORI

Stakeholder

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan Negara, pendapatan Negara serta yang berupa aset Negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Good Governance

Good governance adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel

dan demokratis. Di samping itu, konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good 'national' governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya di mata publik. Konsep *Good governance* tidak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada *stakeholder*-nya.

Semua unit organisasi, apakah dipilih atau ditunjuk, dikatakan akuntabel ketika mereka mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan/kegiatan yang mereka lakukan, dan menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak (tidak dapat diperlenggarjawabkan).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada seseorang atau unit organisasi tersebut dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik hanya dikenal di Negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting (stakeholder). Dimana asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

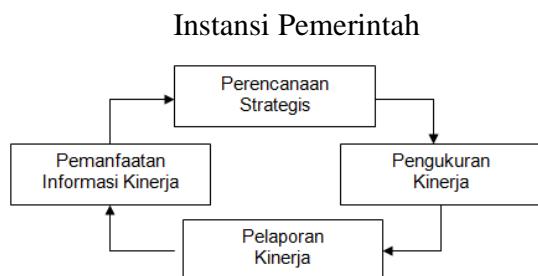
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seprangkat indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- 1) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya se-

cara konsisten dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 3) menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 6) menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar 1 Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja



Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan dalam satu periode waktu tertentu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, fungsi anggaran secara umum adalah pengendalian keuangan terhadap masukan, pengelolaan terhadap aktivitas yang se-

dang berjalan, perencanaan, penentuan prioritas, dan akuntabilitas.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

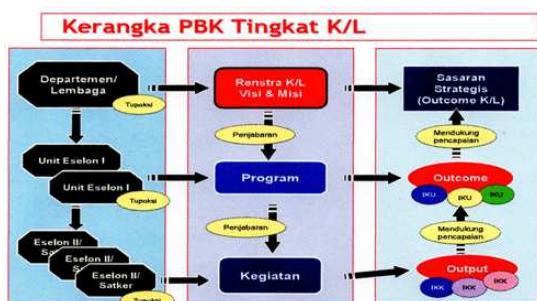
Indra Bastian (2006:171) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Sedangkan Dadang Solihin, Bappenas (2007) mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Berdasarkan teori diatas, anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat dipertang-

gung jawabkan kemanfaatan anggarannya. Prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain; (1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, (2) Disiplin anggaran, (3) Keadilan anggaran, (4) Efisiensi dan efektivitas anggaran, dan (5) Disusun dengan pendekatan kinerja.

Kerangka penganggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Kemeneg PPN/Bappenas, 2009) menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki secara periodik.

Gambar 2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja



Sumber: Pedoman Penerapan PBK (Kemeneg PPN/Bappenas, 2009)

Gambar 2 diatas menjelaskan bagaimana kerangka PBK pada tingkat K/L dan hubu-

ngan masing-masing tingkatan kinerja dalam rangka pencapaian *outcome* K/L.

Siklus Anggaran

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009: 70) terdiri dari empat tahap yang meliputi:

- 1) Perencanaan Anggaran
- 2) Pelaksanaan Anggaran
- 3) Monitoring dan Evaluasi
- 4) Pertanggungjawaban Anggaran

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA), Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan lembaga tersebut tempat peneliti bekerja. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian survey. Metode penelitian survey adalah usaha pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian (Ali, 1997:5). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat

digolongkan sebagai data primer, yaitu data kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Komponen Perencanaan Program dan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran, Pengelola Barang, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Anggota Unit Akuntansi Instansi dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah populasi sebanyak 160 pegawai. Sedangkan penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:124).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dengan cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis secara lengkap tentang masalah yang akan dibahas kepada para responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal dengan nilai skala Sangat Setuju (SS), diberi skala 5, Setuju (S) diberi skala 4, Netral (N) diberi skala 3, Tidak Setuju (TS)

diberi skala 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skala 1. (Santosa dan Ashari:2005:4).

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja sebagai variabel terikat (*dependen*), dan implementasi anggaran berbasis kinerja yang meliputi tahapan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban Anggaran sebagai variabel bebas (*independen*).

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghazali (2009) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dalam hal ini jumlah sampel.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria pengujian dilakukan

dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 .

Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0.10 .

Uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot (P-P Plot)*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scaterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Uji Hipotesis

Tehnik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda untuk meneliti pengaruh X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap Y .

IV. HASIL PENELITIAN

Analisis Karakteristik Responden

1. Usia

Tabel 1 Karakteristik Responden

Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 Tahun	12	7,5
31 - 40 Tahun	41	25,6
41 - 50 Tahun	61	38,1
> 50 Tahun	46	28,8
Total	160	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Pada tabel 1, karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang usia 41-50 tahun (38,1%) sebanyak 61 orang, usia lebih dari 50 tahun (28,8%) sebanyak 46 orang responden, usia 31-40 tahun (25,6%) sebanyak 41 orang responden dan usia kurang dari 30 tahun (7,5%) sebanyak 12 orang responden.

2. Jenis Kelamin

Tabel 2 Karakteristik Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	91	56,9%

Perempuan	69	43,1%
Total	160	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan table 2 di atas, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa sebanyak 91 orang responden berjenis kelamin laki-laki (56,9%) dan sisanya 69 orang responden berjenis kelamin perempuan (43,1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dari komponen Perencanaan Program dan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran, Pengelola Barang, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Anggota Unit Akuntansi Instansi dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sampel lebih banyak jenis kelamin laki-laki.

3. Masa Kerja

Tabel 3 Karakteristik Responden

Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja	Jumlah	Persentase
1 – 5 tahun	40	25%
6 – 10 tahun	61	38,1%
>10 tahun	59	36,9%
Total	352	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, karakteristik responden berdasarkan masa kerja di dominasi oleh responden yang bekerja

selama 6 – 10 tahun sebanyak 61 orang (38,1%). Sebanyak 59 orang responden bekerja selama lebih dari 10 tahun (36,9%), sebanyak 40 orang responden bekerja selama 1 – 5 tahun.

4. Pendidikan Terakhir

Tabel 4 Karakteristik Responden

Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMU/Sederajat	4	2.5%
Diploma	15	9.38%
S1	118	73.75%
S2	18	11.25%
S3	5	3.12%
Total	160	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan pada tabel 4, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebanyak 118 orang responden (73,75%) memiliki pendidikan terakhir S1, sebanyak 18 orang responden (11,25%) pendidikan terakhirnya adalah S2, kemudian sebanyak 15 orang (9,38%) memiliki pendidikan terakhir diploma, sebanyak 5 orang responden (3,12%) memiliki pendidikan terakhir S3 dan sebanyak 4 orang responden (2,5%) memiliki pendidikan terakhir SMU/sederajat.

5. Berdasarkan Jabatan**Tabel 5 Karakteristik Responden****Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah	Percentase (%)
Komponen Perencanaan Program dan Anggaran	39	4.4%
Pejabat Perbendaharaan	29	8.1%
Pengelola Anggaran	44	7.5%
Pengelola Barang	7	4.4%
Tim Penyusun LAKIP	25	15.6%
Anggota Unit Akuntansi Instansi	16	10.0%
Jumlah	160	100.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, karakteristik responden berdasarkan jabatan di dominasi oleh responden yang menjabat sebagai pengelola anggaran yaitu sebanyak 44 orang (27,5%). Sebanyak 39 orang responden (24,4%) menjabat sebagai komponen perencanaan program dan anggaran, 29 orang responden (18,1%) menjabat sebagai pejabat perbendaharaan, sebanyak 25 orang responden (12%) menjabat sebagai tim penyusun LAKIP, sebanyak 16 orang responden (10%) menjabat sebagai anggota unit akuntansi instansi dan sebanyak 7 orang (4,4%) menjabat sebagai pengelola barang.

Analisis Statistik Deskriptif**1. Variabel Perencanaan Program****Anggaran**

Nilai rata-rata sikap responden mengenai perencanaan program anggaran adalah sebesar 3.64 yang berada pada rentang/ interval 3.41 – 4.20, hal ini menunjukkan bahwa persepsi atau sikap responden mengenai perencanaan program anggaran adalah baik. Artinya bahwa responden paham dan mengerti mengenai perencanaan program anggaran.

2. Variabel Pelaksanaan anggaran

Nilai rata-rata sikap responden mengenai pelaksanaan anggaran adalah sebesar 3.47 yang berada pada rentang/interval 3.41- 4.20, hal ini menunjukkan bahwa persepsi atau sikap responden mengenai pelaksanaan anggaran adalah baik. Artinya bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang seharusnya. Persepsi ini berkenaan dengan timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya.

3. Variabel Monitoring dan Evaluasi

Nilai rata-rata sikap responden mengenai monitoring dan evaluasi sebesar 3.59 dengan rentang antara 3.41- 4.20. Hal ini

menunjukkan bahwa sikap responden mengenai monitoring dan evaluasi adalah baik.

4. Variabel Pertanggung jawaban

Anggaran

Nilai rata-rata sikap responden mengenai pertanggungjawaban anggaran sebesar 3.57 dengan rentang antara 3.41-4.20. Hal ini menunjukkan bahwa sikap responden mengenai pertanggungjawaban adalah baik.

5. Variabel Akuntabilitas Kinerja

Nilai rata-rata sikap responden mengenai akuntabilitas kinerja sebesar 3.58 dengan rentang antara 3.41-4.20. Hal ini menunjukkan bahwa sikap responden mengenai akuntabilitas kinerja adalah baik.

Dari kelima variabel penelitian, semua pertanyaan dalam masing-masing variabel dapat dimengerti dan dipahami oleh responden dengan baik, artinya responden memahami dan menguasai bidang terkait implementasi anggaran berbasis kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran, serta memahami tentang akuntabilitas kinerja.

Asumsi Klasik

Uji multikolineritas

Table 6

Coefficients^a

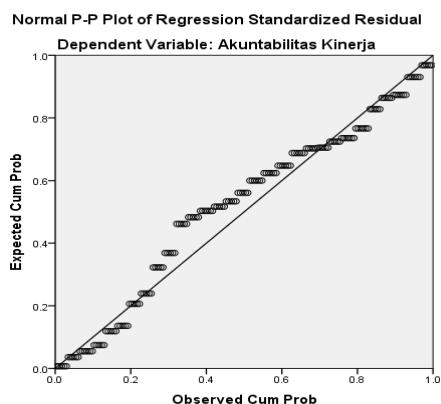
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Perencanaan Anggaran	0.099	1.126
¹ Pelaksanaan Anggaran	0.429	2.332
Monitoring dan Evaluasi	0.920	1.087
Pertanggungjawaban Anggaran	0.107	9.358

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah kurang dari 10. Selain itu, nilai tolerance juga lebih besar dari 0.10. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Normalitas

Gambar 3

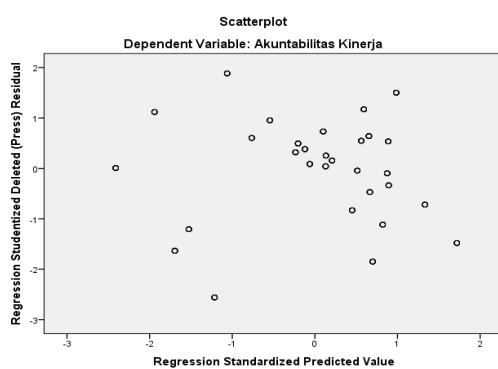


Berdasarkan grafik *normal probability plot* di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjuk-

kan bahwa pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji heteroskedastisitas

Gambar 4



Model tidak terkena heteroskedastisitas karena titik – titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y dengan tidak memiliki pola. Maka dapat dinyatakan data tersebut homogenitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.639	4.64783

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2017)

Nilai koefisien determinasi adalah 0,639, artinya kemampuan variabel independen, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran dalam menjelaskan variabel dependen akuntabilitas kinerja sebesar 0,639 atau 63,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 36,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6176.636	4	1544.159	71.481	.000 ^b
1 Residual	3348.358	155	21.602		
Total	9524.994	159			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Program dan Anggaran

Nilai F hitung sebesar 71,481, dengan $df_1 = 4$, dan $df_2 = 155$ ($n-k-1$), maka di dapat F tabel 2,43, maka nilai F hitung $>$ F tabel ($71,481 > 2,43$) maka regresi memenuhi kriteria kelayakan model untuk memprediksi variabel akuntabilitas kinerja.

Uji t

Table 9

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.402	2.993		.802	.423
Perencanaan Program dan Anggaran	.236	.082	.269	2.862	0.005
Pelaksanaan Anggaran	.458	.165	.263	2.779	0.006
Monitoring dan Evaluasi	.225	.049	.226	4.555	0.000
Pertanggungjawaban Anggaran	.474	.128	.540	3.706	0.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda pada tabel 9 dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,402 + 0,236 X_1 + 0,458 X_2 + 0,225 X_3 + 0,474 X_4 + e$$

Interpretasi atas persamaan di atas adalah:

$b_0 = 2,402$ artinya jika variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 bernilai nol (0), maka variabel Y akan bernilai 2,402 satuan.

$b_1 = 0,236$ artinya jika variabel perencanaan anggaran (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,236 satuan.

$b_2 = 0,458$ artinya jika variabel pelaksanaan anggaran (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,458 satuan.

$b_3 = 0,225$ artinya jika variabel monitoring dan evaluasi (X_3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,225 satuan.

$b_4 = 0,474$ artinya jika variabel pertanggungjawaban anggaran (X_4) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,474 satuan.

Pembahasan

Pengaruh perencanaan program dan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di kementerian pemberdayaan perempuan dan anak

Hasil analisis berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,862 dan t tabel sebesar 1.654 artinya t hitung $>$ t tabel dengan nilai sig sebesar 0.005.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan program dan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dengan asumsi semua indikator perencanaan anggaran yang terdiri dari rencana kerja pemerintah, program/kegiatan, indikator kinerja, dan standar biaya terpenuhi, maka variabel perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA).

Pengaruh pelaksanaan anggaran Terhadap akuntabilitas kinerja di kementerian pemberdayaan perempuan dan anak

Hasil analisis berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,779 dan t tabel sebesar 1.654 artinya t hitung $>$ t tabel dengan nilai sig sebesar 0.006.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan asumsi semua indikator pelaksanaan anggaran yang terdiri dari prioritas penggunaan anggaran, kebijakan pelaksanaan anggaran, dan standar pengeluaran anggaran terpenuhi, maka variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA).

Pengaruh Monitoring dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Hasil analisis berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4.555 dan t tabel sebesar

1.654 artinya t hitung $>$ t tabel dengan nilai sig sebesar 0.000.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan asumsi jika monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka memenuhi indikator pengendalian internal, evaluasi dan perbaikan maka akuntabilitas kinerja akan semakin baik dan meningkat.

Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Hasil analisis berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3.706 dan t tabel sebesar 1.654 artinya t hitung $>$ t tabel dengan nilai sig sebesar 0.000.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan asumsi jika indikator pertanggungjawaban anggaran berupa laporan keuangan dan laporan kinerja telah disusun secara akurat, tepat waktu, dan lengkap, maka akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan meningkat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh implementasi anggaran berbasis kinerja yang meliputi tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban anggaran. Semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja, maka tingkat akuntabilitas kinerja akan naik.
2. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diperbaiki dengan efektifitas penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Efektifitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja didukung oleh tahapan perencanaan anggaran yang matang, ketepatan dalam pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan, dan pertanggungjawaban anggaran yang akurat, transparan, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
4. Diperlukan komitmen pimpinan unit organisasi dan koordinasi yang baik antar komponen yang ada dalam tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, moni-

toring dan evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., 1997. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrianto, N., 2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-government. Bayumedia. Jakarta.
- BPPK, 2008. Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Bahri, S.P., 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pelayanan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Jurnal Universitas Pasundan. Bandung.
- Bappenas. 2009. Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta
- Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar). Erlangga. Jakarta.
- Bambang dkk, 2008. Kajian Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. BPPK. Jakarta.
- Santosa, B., Purbayu dan Ashari, 2005. Analisis Statistik dengan MS. Excel dan SPSS. Andi. Yogyakarta.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (40-56)

Bryson, J.M., 2011. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement.* 4th edition. San Francisco.

Effendi, H., 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius. Yogyakarta.

Ellwood, S., 1993. Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. Local Government Studies. Vol 19, pp 368-386.

Endrayani, K.S., 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi).* Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali

Friska, I.Y., 2013. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja).* Jurnal Universitas Jambi. Jambi.

Freeman, R.E., 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Pitman Publishing. Boston.

Ghozali, I., 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Ghozali, I., 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Halim, A., 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat. Jakarta.

Harjanti, H.P., 2009. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok.* Tesis Universitas Padjadjaran. Jawa Barat.

Haspiarti, 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Pare-Pare).* Skripsi Universitas Hasanuddin. Sulawesi Selatan.

Harun, 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.* Salemba Empat. Jakarta.

Indriantoro, N., 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen.* BPFE. Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara, 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (40-56)

Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal.

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta

Muhamad, M., 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.

Umar Husein, 2008. Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Modul Kelas manajerial Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). 2012. Kebijakan Perencanaan Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Modul Kelas manajerial Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). 2012. Pelaksanaan Anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Modul Kelas manajerial Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). 2012. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Modul Kelas manajerial Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Reviu Atas Laporan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Nurhayati, I., 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Probolinggo)*. Skripsi Universitas Jember. Jawa Timur.

Pusdiklatwas BPKP, 2011. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Keenam. Jakarta.

Riduwan, 2009. Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung.

Riduwan, 2010. Metode dan Teknik Mewujudkan Tesis. Cetakan ketujuh. Alfabeta. Bandung.

Santoso, S., 2004. SPSS Statistik Multivariat. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Santosa, P.B., dan Ashari, 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. Andi Offset. Yogyakarta.

Sarwon, J., 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sefriyana, M., 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu*. Skripsi Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Sekaran, U., 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta